



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 88/KEP/BSN/3/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL*

*ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION / INTERNATIONAL*

*ELECTROTECHNICAL COMMISSION TECHNICAL REPORT 27019:2017*

TEKNOLOGI INFORMASI – TEKNIK KEAMANAN – PANDUAN MANAJEMEN

KEAMANAN INFORMASI BERDASARKAN SNI ISO/IEC 27002 UNTUK

SISTEM KENDALI PROSES SPESIFIK INDUSTRI UTILITAS ENERGI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission Technical Report 27019:2017* Teknologi informasi – Teknik keamanan – Panduan manajemen keamanan informasi berdasarkan SNI ISO/IEC 27002 untuk sistem kendali proses spesifik industri utilitas energi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

Memperhatikan : Surat Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Nomor: 1131/KOMINFO/SP.04.05/12/2016 tanggal 15 Desember 2016 perihal Penyerahan Dokumen Kelengkapan Penetapan RSNI Komite Teknis 35-01: Teknologi Informasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION / INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION TECHNICAL REPORT 27019:2017* TEKNOLOGI INFORMASI – TEKNIK KEAMANAN – PANDUAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI BERDASARKAN SNI ISO/IEC 27002 UNTUK SISTEM KENDALI PROSES SPESIFIK INDUSTRI UTILITAS ENERGI.

PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission Technical Report* (SNI ISO/IEC TR) 27019:2017 Teknologi informasi – Teknik keamanan – Panduan manajemen keamanan informasi berdasarkan SNI ISO/IEC 27002 untuk sistem kendali proses spesifik industri utilitas energi.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

- KEDUA : SNI ISO/IEC TR 27019:2017 Teknologi informasi – Teknik keamanan – Panduan manajemen keamanan informasi berdasarkan SNI ISO/IEC 27002 untuk sistem kendali proses spesifik industri utilitas energi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan adopsi identik dari standar ISO/IEC TR 27019:2013, *Information technology – Security techniques – Information security management guidelines based on ISO/IEC 27002 for process control systems specific to the energy utility industry.*
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

  


BAMBANG PRASETYA